

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak daerah terletak pada kriteria sangat efektif.

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo. Hal ini diakibatkan oleh kecenderungan data efektivitas pajak daerah yang tidak sejalan dengan peningkatan dan penurunan efektivitas pendapatan asli daerah. Selain itu, hal ini diakibatkan oleh belum maksimalnya efektivitas dari sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya yang akibatnya akan berdampak pada belum efektifnya pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini memiliki koefisien positif mengindikasikan bahwa apabila terjadi peningkatan pada efektivitas pajak daerah maka efektivitas pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat.

2. Efektivitas retribusi daerah terletak pada kriteria yang cukup efektif.

Berdasarkan pengujian statistik ditemukan bahwa efektivitas retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo. Pengaruh positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan dan

keterkaitan antara peningkatan maupun penurunan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah.

3. Berdasarkan pengujian statistik pengujian simultan ditemukan bahwa efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut juga terlihat dari nilai koefisien determinasi yang besar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan jumlah peningkatan pajak daerah dengan langkah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan daerah.
2. Terkait Retribusi masih terletak pada kriteria yang cukup efektif, sehingga pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk terus memeriksa, mengevaluasi dan menindaklanjuti segala hal terkait dengan penganggaran retribusi daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian faktor-faktor lain terkait dengan efektivitas pendapatan asli daerah. Faktor-faktor lain yang dimaksud (Mahmudi, 2010) antara lain: Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Kontribusi Pad lain-lain yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dina. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Balai Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Astuti. 2011. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. [Http://Perpus.unpam.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=6611](http://Perpus.unpam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6611).  
Diaskes: 26 Maret 2015
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Ghozali, Imam. 2005. *Asplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Gorontalo. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 atas Perubahan UU No 32 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 atas Perubahan UU No 33 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 atas Perubahan UU No 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 atas Perubahan UU No 6 Thun 1998 tentang Pajak Reklame Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 atas Perubahan UU No 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 atas Perubahan UU No 2 Tahun 1998 tentang Pajak Air Mineral Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 39 Tahun 2010 tentang Pajak BPHTB Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gorontalo.

- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Gorontalo.
- Hadiat, Aseo Lalan. 2012. Pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Halim, Abdul. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Handyaningrat, Soewarno. 1995. *Azas-Azas Organisasi Manajemen*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Latan, Hengky dan Selva Temalagi. 2013. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung: ALVABETA.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.
- Puspitasari, Ayu. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora 2009-2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ssyarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati Ely. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 atas perubahan UU No 18 Tahun 1997 dan UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 atas Perubahan UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Rahmani, Syifa. 2008. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_ 2012. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika (Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan E-Views) cetakan ke empat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zain, Mohammad. Suryo, Hermana. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta: PT Indeks.